

Analisis Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011 – 2021

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Tri Yuli Nuraeni

Nomor Mahasiswa : 18313024

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2022

HALAMAN JUDUL

Analisis Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran
Terbuka di Indonesia Tahun 2011 – 2021

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Tri Yuli Nuraeni

Nomor Mahasiswa : 18313024

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 September 2022

Penulis



Tri Yuli Nuraeni

PENGESAHAN

Analisis Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran
Terbuka di Indonesia Tahun 2011 – 2021

Nama : Tri Yuli Nuraeni
Nomor Mahasiswa : 18313024
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 11 September 2022

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

ACC ujian skripsi 2022



Dra. Indah Susantun, M.si

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM, PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB), DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2021**

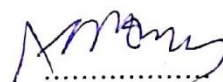
Disusun Oleh : **TRI YULI NURAENI**

Nomor Mahasiswa : **18313024**

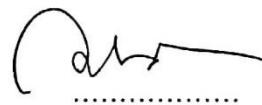
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Jumat, 14 Oktober 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Indah Susantun,Dra.,M.Si.**



Penguji : **Sahabudin Sidiq,Dr.,S.E., M.A.**



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, SE., M.Si.,Ph.D.,CFrA.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011 – 2021

Disusun Oleh : **Tri Yuli Nuraeni**

Nomor Mahasiswa : **18313024**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan

Pada hari, tanggal :

Pembimbing Skripsi : Indah Susantun, Dra., M.si.

Penguji : Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., M.A.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin., M.Si.,Ph.D.,CFrA.

PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/diujikan dan disahkan untuk

Memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Sarjana jenjang Strata 1 Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Nama : Tri Yuli Nuraeni

Nomor Mahasiswa : 18313024

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 11 September 2022

Disahkan Oleh,

Pembimbing Skripsi : Indah Susantun, Dra., M.si.

Penguji : Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., M.A.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin., M.Si.,Ph.D.,CFrA.

HALAMAN MOTTO

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”

(QS. At-Taubah : 40)

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah : 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia yang telah diberikan Allah SWT, dan rasa bangga yang amat dalam penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan berjuang untuk keberhasilan anak – anaknya.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011 – 2021” yang disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 pada program studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini terdapat ilmu yang bermanfaat. Penulis juga menyadari banyak kontribusi dari pihak – pihak yang terlibat dalam menyusun skripsi ini, maka penulis ucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusinya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Tri Widarto dan Ibu Musbikah yang selalu mendoakan penulis dan memberikan fasilitas, dukungan yang tak terhingga.
3. Ibu Dra. Indah Susantun., M.si. selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih telah memberikan arahan, ilmu, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin., M.Si., Ph.D., C.FrA. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonometrika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Abdul Hakim SE., M.Ec., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
7. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademika program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

8. Kakak penulis, Tri Purwiyanto dan Tri Widowati yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Teman – teman penulis, Yumna Azzuhdiyah, Fudhla Rahma Amalia, Vania Elvaretta, Mutia Anjali yang selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis selama menyusun skripsi
10. Seluruh teman – teman di prodi Ilmu Ekonomi 2018 yang selalu mendukung dan berjuang bersama

Penulis menyadari tanpa adanya kontribusi dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Dengan kerendahan hati penulis juga menyadari dan memohon maaf bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 11 September 2022

Penulis



Tri Yuli Nuraeni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	v
PENGESAHAN UJIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II.....	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Pengangguran.....	10
2.2.2 Inflasi.....	11
2.2.3 Upah Minimum	12
2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto	13
2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia	14
2.2.6 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen	15

2.3	Kerangka Pemikiran.....	18
2.4	Hipotesis Penelitian.....	18
BAB III.....		19
3.1	Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	19
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	19
3.3	Metode Analisis.....	20
3.3.1	Common Effect Models	20
3.3.2	Fixed Effect Models	21
3.3.3	Random effect models.....	21
3.3.4	Uji Chow (Uji F-statistik).....	21
3.3.5	Uji Hausman	21
3.3.6	Pengujian Hipotesis	22
BAB IV		24
4.1	Analisis Deskriptif Data.....	24
4.2	Regresi Data Panel.....	28
4.2.1	Pemilihan Model.....	28
4.2.2	Uji Chow.....	28
4.2.3	Uji Hausman	28
4.3	Model Regresi Terbaik.....	29
4.3.1	Koefisien Determinasi (R^2)	29
4.3.2	Uji Analisis F statistik	30
4.3.3	Uji Analisis T statistik.....	30
4.3.4	Analisis Ekonomi	31
4.3.5	Analisis Intersep	35
BAB V		37
5.1	Kesimpulan.....	37
5.2	Implikasi.....	37
DAFTAR PUSTAKA		39
LAMPIRAN.....		42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia tahun 2011-2021(%)	2
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	18
Gambar 4. 1 Grafik Variabel Pengangguran di Indonesia tahun 2011-2021	25
Gambar 4. 2 Grafik Variabel Inflasi di Indonesia tahun 2011-2021	25
Gambar 4. 3 Grafik Variabel Upah Minimum di Indonesia tahun 2011-2021	26
Gambar 4. 4 Grafik Variabel PDRB di Indonesia tahun 2011-2021.....	26
Gambar 4. 5 Grafik Variabel IPM di Indonesia tahun 2011-2021	27



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Inflasi, Upah Minimum, PDRB dan IPM di Indonesia Tahun 2011-2021 ..	3
Tabel 4. 1 Deskriptif Data Penelitian	24
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow	28
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausment	28
Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Fixed Effect Models	29
Tabel 4. 5 Hasil Intersep Cross section effect	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Variabel Penelitian	42
Lampiran 2 : Pemilihan Model Terbaik	55
Lampiran 3 : Uji Fixed Effect Models.....	56



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011 – 2021. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian yang digunakan yaitu Regresi data panel dengan *time series* tahun 2011-2021 dan *cross section* 33 provinsi di Indonesia menggunakan alat analisis *evIEWS 12*. Hasil Penelitian ini menunjukkan Variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011-2021. Variabel Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011-2021. Variabel PDRB dan IPM berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011-2021. *Intersep* tertinggi berada di DKI Jakarta dengan koefisien sebesar 33.702050 dan terendah di Sulawesi Barat 18.565777.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

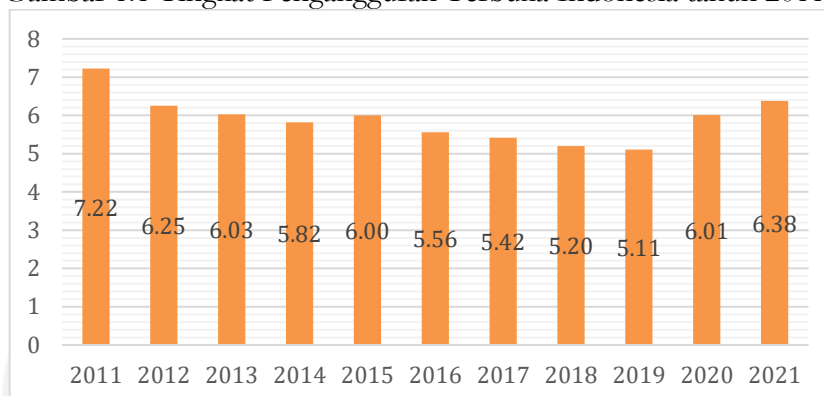
Pembangunan ekonomi secara nasional merupakan langkah yang ditempuh dalam upaya meningkatkan kualitas manusia yang lebih baik secara berkelanjutan dengan tujuan penciptaan landasan yang tidak mudah goyah bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945 (P. M. Todaro, 2000).

Kondisi Indonesia dalam sumber daya manusia terdapat permasalahan pada pengangguran yang dikarenakan sumber daya manusia yang masih rendah. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan bahwa Indonesia pada tahun 2020 menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara. Tingkat pengangguran dengan usia muda di Indonesia mendekati angka 20% dengan tingkat pengangguran di negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura dan Malaysia masih di bawah 15% (Faisal, 2021).

Tingginya pengangguran diakibatkan ketidaksesuaian lapangan kerja dengan kualifikasi yang dimiliki oleh para pencari kerja. Selain itu pandemi covid-19 juga memberikan tambahan proporsi peningkatan pengangguran yang hampir mencapai 40%. Pengangguran merupakan akibat yang ditimbulkan oleh tingginya angka angkatan kerja namun tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang seimbang.

Pengukuran pengangguran menggunakan persentase jumlah orang yang tidak bekerja terhadap jumlah angkatan kerja disebut dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT dapat memberikan gambaran terkait kinerja pasar tenaga kerja serta keadaan ekonomi dalam kondisi yang tidak seimbang. Berikut data tingkat pengangguran di Indonesia: (Badan Pusat Statistik, 2022).

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia tahun 2011-2021(%)



Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui berapa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2011-2019, akan tetapi di tahun 2020-2021 mengalami kenaikan. Selama tahun 2011-2019 sektor yang memiliki penyerapan tenaga kerja berada di sektor industri, konstruksi, penyedia akomodasi dan makanan minuman. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan investasi yang memberikan efek berantai dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor (Hartarto, 2019).

Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6.03% naik sebesar 0.88 persen poin dibanding tahun 2019, hal ini disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia. Pengangguran karena covid-19 mencapai 2.56 juta orang. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6.38% naik sebesar 0.35 persen poin. Tahun 2021 terdapat lebih dari 21 juta orang yang tidak bekerja terdampak covid-19, pengangguran terbanyak berasal dari penduduk bekerja namun mengalami pengurangan jam kerja yaitu sebanyak 17.41 juta orang.

Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah mengupayakan penuruann tingkat pengangguran. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menurunkan pangagguran berdasarkan beberapa teori dan jurnal. Pada teori Phillips yang memiliki hubungan negative dengan inflasi sehingga ketika inflasi meningkat akan menurunkan tingkat pengagguran (Phillips, 1958).

Pada teori yang kedua adalah hukum okun yang menjelaskan terkait hasil produksi suatu negara yang mengalami peningkatan akan berdampak pada

kesempatan kerja. Apabila kesempatan kerja meningkat maka pengangguran akan menurun karena produktivitas tenaga kerja meningkat (Okun, 1962)

Berdasarkan Kementrian Ketenagakerjaan cara untuk mengurangi pengangguran melalui peningkatan kegiatan yang membuka kesempatan kerja. Upaya pemerintah melakukan peningkatan infrastruktur, melakukan kegiatan Pelatihan Kepada Masyarakat (PKM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan demikian akan meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat menyebabkan upah meningkat. Berikut data upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran: (Menteri Ketenagakerjaan, 2021)

Tabel 1.1 Inflasi, Upah Minimum, PDRB dan IPM di Indonesia Tahun 2011-2021

TAHUN	INFLASI (%)	UPAH MINIMUM (Rupiah)	PDRB (Ribu Rupiah)	IPM (%)
2011	3,79	988.829	7.287.635.30	67,09
2012	4,30	1.088.903	7.727.083.40	67,70
2013	8,38	1.296.908	8.156.497.80	68,31
2014	8,36	1.584.391	8.564.866.60	68,90
2015	3,35	1.790.342	8.982.517.10	69,55
2016	3,02	1.997.819	9.434.613.40	70,18
2017	3,61	2.075.274	9.912.928.10	70,81
2018	3,13	2.268.874	10.425.851.90	71,39
2019	2,72	2.455.662	10.949.155.40	71,92
2020	1,68	2.672.371	10.723.054.80	71,94
2021	1,87	2.684.743	11.118.868.50	72,29

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Dengan demikian pada tahun 2011-2019 mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka. Kondisi inflasi mengalami kenaikan pada tahun 2011-2019 sesuai teori Phillips seharusnya pengangguran menurun akan tetapi pada

data diatas pengangguran meningkat. Kondisi tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan teori Phillips.

Kondisi PDRB mengalami kenaikan disetiap tahunnya, sesuai teori Okun seharusnya pengangguran mengalami penurunan. Akan tetapi pada data diatas pengangguran meningkat, kondisi tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan teori Okun. Hasil kinerja pemerintah dalam menurunkan pengangguran adalah meningkatkan kualitas sumber daya, sehingga IPM akan meningkat. Akan tetapi pada Tabel 1.1 IPM terjadi peningkatan akan tetapi pengangguran juga turut meningkat sehingga upah tidak akan sesuai.

Kondisi diatas menjelaskan bahwa pengangguran tidak dapat diturunkan menurut teori Phillips yaitu pada inflsi, Hukum Okun pada PDRB maupun upaya pemerintah untuk meningkatkan IPM dan upah. Dengan demikian diperlukan pengujian kembali berdasarkan teori dan kondisi yang ada di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada tahun 2011-2021?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada tahun 2011-2021?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada tahun 2011-2021?
4. Bagaimana pengaruh IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada tahun 2011-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirincikan tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada tahun 2011-2021
2. Menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada tahun 2011-2021

3. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada tahun 2011-2021
4. Menganalisis pengaruh IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada tahun 2011-2021

1.4 Manfaat Penelitian

Salah satu manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Selain itu manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini menjelaskan pengaruh Inflasi, Upah Minimum, PDRB dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk masa yang akan datang khususnya tentang penyebab pengangguran.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, masukan, tambahan informasi, dan membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai topik faktor yang menyebabkan pengangguran.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini akan menjelaskan terkait dengan hasil penelitian sebelumnya yang bersumber dari jurnal ilmiah dengan topik yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan terkait dengan jenis dan cara pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis.

BAB IV: Hasil dan Analisis

Bab ini akan menjelaskan terkait dengan hasil penelitian yang bersumber dari data penelitian dan penjelasan lebih lanjut terkait dengan analisis penelitian.

BAB V: Kesimpulan dan Implikasi

Bab ini akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan yang berasal dari hasil analisis penelitian serta saran atau masukan bagi pihak terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kumpulan dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Pengangguran, Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kajian Pustaka memiliki tujuan agar penelitian yang akan dilakukan memiliki data pendukung yang kuat sehingga dapat memberikan hasil analisis yang baik dan kuat. Berikut penelitian-penelitian terdahulu :

Penelitian dengan judul Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen dan pengangguran sebagai variabel dependen. Hasil penelitian diketahui variabel tingkat pendidikan rasio SMA (TPSMA) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran pada 33 provinsi di Indonesia. Variabel tingkat pendidikan rasio Universitas, upah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran pada 33 provinsi di Indonesia (Indra & Hadi, 2016).

Penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan asosiatif, metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba menggambarkan serta menjabarkan secara apa adanya dengan data yang digunakan berbentuk angka. Sedangkan untuk metode penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil penelitian diperoleh Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia pada periode tahun 2011-2015. Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia pada periode tahun 2011-2015 (Prawira, 2018).

Penelitian dengan judul Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran di Indonesia. Penelitian ini memiliki variabel independen Inflasi, IPM, dan Upah untuk variabel dependen Pengangguran. Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Pengangguran di Indonesia. Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia (Socharjoto & Oktavia, 2021).

Penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah untuk variabel dependen adalah Pengangguran. Inflasi dan Upah berpengaruh negative terhadap Pengangguran terdidik di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh (Putri, 2015).

Penelitian dengan judul Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Periode 2003-2019. Variabel indepen yang digunakan dalam penelitian ini PDRB dan Inflasi untuk variabel dependen yaitu Pengangguran. Dari data diketahui bahwa secara parsial Produk Domestik Riil Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap Pengangguran terbuka. Secara parsial Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pengangguran terbuka (Silaban et al., 2020).

Penelitian dengan judul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011 – 2017. Penelitian ini menggunakan variabel independen PDRB, Inflasi, Upah dan Jumlah Penduduk untuk variabel dependen yaitu Pengangguran. Hasil penelitian adalah PDRB, Inflasi dan Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011 – 2017. Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011 – 2017 (Sembiring & Sasongko, 2019).

Penelitian dengan judul Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Neraca Perdagangan Terhadap Jumlah Pengangguran Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel independen Inflasi, PDB dan

Neraca Perdagangan, untuk variabel dependen yang digunakan adalah Pengangguran. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kenaikan harga secara terus menerus tidak memberikan dampak terhadap Pengangguran, PDB berpengaruh positif terhadap Pengangguran, Neraca Perdagangan berpengaruh negatif terhadap tingkat Pengangguran (Rahmiati & Panorama, 2020).

Penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan variabel independen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan adalah Pengangguran di Provinsi Maluku. Dari hasil penelitian diketahui bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran (Saptenno & Maatoke, 2015).

Penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan variabel independen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi dan Upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka (Marliana, 2022).

Berdasarkan kajian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011 – 2021”** metode yang akan digunakan adalah metode analisis regresi data panel seperti yang di lakukan oleh (Indra & Hadi, 2016)(Prawira, 2018)(Sembiring & Sasongko, 2019)(Saptenno & Maatoke, 2015). Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana pada penelitian ini menggunakan periode tahun 2011-2021 dengan objek penelitian 33 provinsi di Indonesia. Penelitian terdahulu yang menjadi panutan sebagaimana dalam

penelitian yang menggunakan variable Inflasi yang dilakukan oleh (Indra & Hadi, 2016)(Socharjoto & Oktavia, 2021)(Putri, 2015)(Silaban et al., 2020)(Sembiring & Sasongko, 2019)(Rahmiati & Panorama, 2020)(Saptenno & Maatoke, 2015). Penelitian yang menggunakan variable Upah Minimum (Indra & Hadi, 2016)(Prawira, 2018)(Socharjoto & Oktavia, 2021)(Putri, 2015)(Sembiring & Sasongko, 2019)(Marliana, 2022). Penelitian yang menggunakan variable Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Silaban et al., 2020)(Sembiring & Sasongko, 2019)(Rahmiati & Panorama, 2020). Penelitian yang menggunakan variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Socharjoto & Oktavia, 2021)(Saptenno & Maatoke, 2015)(Marliana, 2022).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengangguran

2.2.1.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran menjadi salah satu permasalahan dalam perekonomian yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup seorang manusia. Ketika seseorang yang tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak bekerja akan berdampak terhadap menurunnya tingkat kesejahteraannya. Maka masalah pengangguran menjadi topik pembahasan penting dalam perekonomian dan tidak jarang terjadi perdebatan antara para politisi dalam lingkup politik ketika akan menentukan suatu kebijakan dalam upaya mengatasi pengangguran, menciptakan lapangan kerja baru atau pengajian kembali kebijakn yang sudah diterapkan (Mankiw, 2007).

Pengangguran adalah penduduk tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mencoba memepersiapan usaha atau penduduk yang sama sekali tidak mencari pekerjaan sebab sudah bekerja namun belum memulai untuk melakukan pekerjaan. (Badan Pusat Statistik, 2022)

$$\text{Rumus pengangguran : } TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan :

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

PP : Jumlah Pengangguran (orang)

PAK : Jumlah Angkatan Kerja (orang)

2.2.1.2 Penyebab Pengangguran

Sadono Sukirno menjelaskan bahwa pengangguran dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan penyebab dan ciri-ciri nya sebagai berikut:

- a. Pengangguran berdasarkan penyebabnya:
 - i. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya gap atau jeda antara waktu menganggur hingga diterima bekerja.
 - ii. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi
 - iii. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan siklus ekonomi
 - iv. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan atau kemajuan teknologi.
- b. Pengangguran berdasarkan ciri-cirinya :
 - i. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena sudah tidak tersedianya lapangan kerja
 - ii. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih banyak dari yang dibutuhkan
 - iii. Pengangguran setengah menganggur adalah pengangguran yang terjadi karena bekerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu
 - iv. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada musim-musim tertentu, pengangguran ini ada di sektor pertanian dan perikanan (Sadono, 2004).

2.2.2 Inflasi

2.2.2.1 Pengertian Inflasi

Inflasi menurut teori Keynes didasarkan pada teori makro yang menjelaskan bahwa inflasi dapat terjadi karena dipicu oleh kecenderungan suatu masyarakat untuk hidup diluar batas kemampuan ekonomi. Situasi seperti ini dapat diketahui dari permintaan masyarakat akan berbagai barang yang melampaui jumlah barang yang tersedia hingga memicu *inflationary gap*. Ketika terjadi *inflationary gap* akan terjadi inflasi secara berkelanjutan (Boediono, 1998).

Inflasi menurut teori Philips menjelaskan terkait hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran dengan dasar asumsi jika inflasi merupakan bayangan dari kenaikan permintaan agregat. Ketika terjadi kenaikan permintaan agregat maka sesuai dengan teori permintaan yaitu jika permintaan mengalami kenaikan maka harga naik. Dengan tingginya tingkat harga umum (inflasi) guna memenuhi permintaan yang belum tercukupi para produsen menambah kapasitas produksi dengan menambah tenaga kerja maka pengangguran berkurang (Phillips, 1958).

Inflasi menurut Badan Pusat Statistik merupakan kecenderungan peningkatan harga barang serta jasa secara umum selama periode waktu tertentu. Peningkatan harga barang dan jasa akan memicu turunnya nilai uang. Inflasi juga dapat diartikan bahwa sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. BPS menggunakan Indeks Harga Konsumen sebagai indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat inflasi. IHK pada setiap periode dapat menggambarkan inflasi atau deflasi dari barang dan jasa (Badan Pusat Statistik, 2021).

2.2.3 Upah Minimum

2.2.3.1 Pengertian Upah Minimum

Upah minimum merupakan standar paling rendah yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan upah kepada para pekerja atau karyawan di lingkungan perusahaan. Pemerintah telah mengatur upah minimum yang dapat diberikan oleh perusahaan pada karyawan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989. Upah minimum ditetapkan setiap tahun oleh Dewan Pengupah Daerah yang merupakan para akademisi, pengusaha serta buruh atau pekerja yang telah bersepakat sebagai tim survey (Kementrian Ketenagakerjaan RI, 1999).

Pada UU No. 13 tahun 2003 menjelaskan terkait hak pekerja dalam memperoleh penghasilan guna memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemberian upah serta tunjangan diberikan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau menurut perundang-undangan. Kesejahteraan pekerja yang baik akan mendorong produktivitas dalam bekerja di lingkungan kerja yang sehat dan aman (Kementrian Perindustrian, 2003).

Menurut BPS upah minimum adalah standar minimum yang menjadi patokan para pengusaha dalam memberikan upah kepada para karyawan atau pekerja dalam lingkup usaha. Upah minimum atau upah dasar yang diberikan merupakan upah pokok yang belum ditambah dengan tunjangan perusahaan yang diberikan (Badan Pusat Statistik, 2022).

2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto

2.2.4.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Sadono Sukirno Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah yang diperoleh dari berbagai kegiatan ekonomi pada suatu wilayah, dengan mengabaikan kepemilikan atas faktor produksi. Indikator PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga konstan yang menunjukkan harga yang digunakan berdasarkan satu tahun dasar dan harga berlaku yang menunjukkan harga yang digunakan berdasarkan tahun berlaku. Dengan demikian harga konstan digunakan untuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan harga berlaku mencerminkan adanya inflasi (Sukirno, 2005).

Menurut Badan Pusat Statistika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah tambahan nilai yang dihasilkan seluruh unit usaha di suatu wilayah tertentu atau total nilai barang dan jasa akhir yang dapat dihasilkan oleh seluruh unsur ekonomi pada suatu wilayah. BPS menggolongkan PDRB menjadi 2 indikator yaitu PDRB berdasarkan lapangan usaha yang menunjukkan kategori lapangan usaha dan berdasarkan pengeluaran yang menunjukkan pengeluaran masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2022).

2.2.4.2 Cara perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Sadono Sukirno perhitungan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan diantaranya pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Penjelasan sebagai berikut:

a. Pendekatan Produksi

Jumlah seluruh hasil produksi pada suatu negara pada periode waktu tertentu Unit produksi dikelompokkan kedalam 9 sektor yaitu Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan

Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa, Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan, Listrik.

b. Pendekatan pengeluaran

Jumlah seluruh pengeluaran seluruh pelaku ekonomi yang mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok pada periode waktu tertentu.

c. Pendekatan Pendapatan

Jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang turut dalam proses perekonomian. Balas jasa faktor produksi mencakup pada sewa rumah, upah atau gaji, bunga modal serta laba. Semua dihitung sebelum dilakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak-pajak lain (Sukirno, 2013).

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

2.2.5.1 Pengertian

Menurut Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator pencapaian pembangunan sosial dan ekonomi dalam suatu negara dengan menggabungkan pencapaian di bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan riil per kapita yang telah disesuaikan (M. P. Todaro & Smith, 2011).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu negara dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM menjadi mengkategorikan peringkat pembangunan suatu wilayah/negara. Pada pemerintah IPM menjadi salah satu indikator dalam penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) karena dianggap sebagai ukuran kinerja Pemerintah Indonesia

Menurut United Nation Development Program (UNDP) melakukan penetapan pada kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan skala, sebagai berikut: (UNDP, 1990)

Level Rendah	: IPM kurang dari 50,0
Level Menengah Bawah	: IPM antara 50,0- 65,9
Level Menengah Atas	: IPM antara 66,0- 79,9

Level tinggi : IPM sama dengan dan lebih dari 80,0

Adanya nilai Indeks Pembangunan Manusia di suatu wilayah yang digunakan untuk memperkirakan perkembangan suatu wilayah dalam mencapai sasaran pembangunan manusia. Sasaran yang dilakukan melalui taraf angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat, dan standar kelayakan hidup. Apabila semakin dekat nilai Indeks Pembangunan Manusia terhadap angka 100, maka sasaran yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik.

2.2.5.2 Indikator perhitungan

Menurut Badan Pusat Statistika terdapat 3 indikator dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia diantaranya :

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Akan tetapi pada 3 indikator diatas yang digunakan untuk menjelaskan umur panjang dan hidup sehat menggunakan data Angka Harapan Hidup. Pada bidang pengetahuan menggunakan data Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf. Bidang Standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Penggunaan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan sebagai capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi menggunakan capaian pada dimensi lain. Artinya, dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, tiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama sebab memiliki keterkaitan dan memiliki kepentingan yang sama.

2.2.5.3 Cara perhitungan

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran berikut perhitungannya :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran}} \times 100$$

2.2.6 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.2.6.1 Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Terdapat Pengaruh inflasi dengan tingkat pengangguran yang dikemukakan oleh Philips. Menurut Philips Pengaruh inflasi dan tingkat

pengangguran menggunakan dasar asumsi bahwa inflasi adalah bayangan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Inflasi memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia, tingkat inflasi didasarkan dengan asumsi bahwa inflasi adalah cerminan dari kenaikan permintaan agregat. Permintaan agregat berdasarkan teori permintaan menjelaskan ketika permintaan naik akan memicu kenaikan harga. Dengan tingginya tingkat harga umum (inflasi) guna memenuhi permintaan yang belum tercukupi para produsen menambah kapasitas produksi dengan menambah tenaga kerja maka pengangguran berkurang.

Dengan demikian hubungan inflasi dengan tingkat pengangguran adalah negatif apabila inflasi meningkat maka pengangguran turun dan sebaliknya. Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran yang dilakukan oleh (Indra & Hadi, 2016)(Putri, 2015)(Sembiring & Sasongko, 2019).

2.2.6.2 Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Terdapat Pengaruh Upah Minimum dengan tingkat pengangguran. Penetapan upah minimum yang dilakukan pemerintah dalam wilayah tertentu akan berpengaruh pada besarnya tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena semakin tinggi upah yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan penawaran tenaga kerja serta biaya produksi yang perlu dikeluarkan perusahaan. Ketika perusahaan harus mengeluarkan biaya yang semakin tinggi maka perusahaan akan melakukan efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja sehingga pengangguran meningkat.

Dengan demikian hubungan upah minimum dengan tingkat pengangguran adalah positif apabila upah menurun maka pengangguran menurun dan sebaliknya. Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran (Prawira, 2018).

2.2.6.3 Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hubungan PDRB dengan tingkat pengangguran dapat dijelaskan melalui hukum Okun yang mengatakan bahwa setiap 2 persen penurunan pendapatan nasional secara relatif maka tingkat pengangguran akan naik satu

persen. Ketika terjadi penurunan pendapatan nasional yang diukur menggunakan PDRB kondisi tersebut merupakan cerminan dari adanya penurunan keseimbangan dipasar barang. Ketika permintaan agregat mengalami penurunan kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja yang menyebabkan pengangguran meningkat. Hal ini menunjukkan ketika terjadi penurunan PDRB akan menaikkan jumlah pengangguran.

Dengan demikian hubungan PDRB dengan tingkat pengangguran adalah negatif apabila PDRB meningkat maka pengangguran menurun dan sebaliknya. Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran (Putri, 2015)(Silaban et al., 2020)(Sembiring & Sasongko, 2019)

2.2.6.4 Pengaruh IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan dalam melihat seberapa besar capaian pembangunan manusia. IPM memiliki komponen yang perlu diperhatikan diantaranya capaian umur panjang serta sehat dimana capaian itu mewakili di bidang kesehatan, partisipasi sekolah dan lamanya bersekolah, angka melek huruf mewakili dalam bidang pendidikan. Ketika IPM mengalami peningkatan maka kemampuan dan pengetahuan seseorang akan ikut meningkat. Kondisi tersebut mendorong produktivitas tenaga kerja dengan hasil produksi yang lebih banyak. Produktivitas tenaga kerja meningkat maka permintaan akan tenaga kerja turut meningkat sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Ketika tingkatan pendidikan masyarakat semakin tinggi maka akan diikuti oleh peningkatan pengetahuan dan keahlian serta akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Produktivitas kerja yang bagus akan memperoleh tenaga kerja yang baik dan akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Dengan demikian mereka akan mendapatkan gaji yang besar ketika bisa memperoleh hasil yang banyak (Mulyadi, 2003)

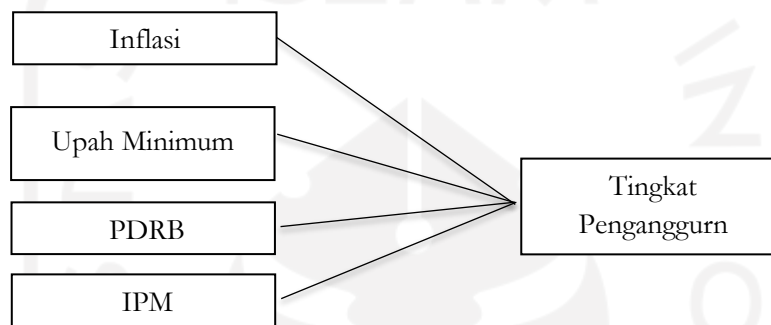
Dengan demikian hubungan IPM dengan tingkat pengangguran adalah negatif apabila IPM meningkat maka pengangguran menurun dan sebaliknya.

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran (Soeharjoto & Oktavia, 2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menjelaskan terkait bagaimana pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas maka dapat diperoleh hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. H_1 : Inflasi diduga mempunyai pengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) di Indonesia pada tahun 2011-2021
2. H_2 : Upah Minimum diduga mempunyai pengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) di Indonesia pada tahun 2011-2021
3. H_3 : Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) diduga mempunyai pengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) di Indonesia pada tahun 2011-2021
4. H_4 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diduga mempunyai pengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) di Indonesiapada tahun 2011-2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari dua jenis yaitu data antar tempat dan ruang (*cross-section*) yang mencakup 33 provinsi di Indonesia dan data antar waktu (*time-series*) dengan periode waktu 2011-2021. Sumber data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, dan variabel independen Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu :

a. Variabel dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu persentase total pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Data yang digunakan merupakan Tingkat Pengangguran Terbuka pada 33 provinsi di Indonesia dengan periode waktu 2011-2021. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dengan satuan persen.

b. Variabel independen

i. Variabel Inflasi yaitu peningkatan harga barang serta jasa secara umum selama periode waktu tertentu. Data yang digunakan Inflasi pada 33 provinsi di Indonesia dengan periode waktu 2011-2021. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dengan satuan persen.

ii. Variabel upah minimum adalah penerimaan hasil yang didapatkan oleh pekerja sebagai upaya pemenuhan komponen-komponen kebutuhan pokok dalam melangsungkan kehidupan sesuai dengan standar hidup manusia. Data upah minimum pada 33 provinsi di Indonesia dengan periode waktu 2011-2021. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dengan satuan rupiah.

- iii. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita berdasarkan harga konstan adalah total nilai tambah yang dihasilkan semua unit usaha dalam suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu 1 tahun dan pendapatan perkapita yaitu pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal pada daerah tersebut. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita berdasarkan harga konstan pada 33 provinsi di Indonesia dengan periode waktu 2011-2021. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistic (BPS) Indonesia dengan satuan ribu rupiah.
- iv. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu alat ukur dalam upaya pencapaian kualitas pembangunan manusia. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 33 provinsi di Indonesia dengan periode waktu 2011-2021. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistic (BPS) Indonesia dengan satuan persen.

3.3 Metode Analisis

Penelitian menggunakan metode regresi data panel, alat pengolah data yang digunakan Eviews 9. Dengan menggunakan data regresi data panel yang memiliki karakteristik data cross section dan time series . Maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut :

Persamaan model :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

X1 = Inflasi (%)

X2 = Upah Minimum (Rupiah)

X3 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Ribu Rupiah)

X4 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)

Dalam proses regresi memerlukan 3 (tiga) metode, yaitu :

3.3.1 Common Effect Models

Metode *Common Effect Models* adalah metode awal paling sederhana dalam proses estimasi data panel yang menggabungkan data *time series* dan data

cross section dengan metode *ordinary least squares* (OLS). Dalam metode ini persamaan CEM dalam bentuk linier sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

3.3.2 Fixed Effect Models

Metode dengan *fixed effect model* mengasumsikan bahwa koefisien regresi tidak berubah antar ruang dan waktu. *Fixed effect Models* menggunakan dummy penjelas perbedaan intersep. Dalam estimasi *fixed effect models* disebut juga dengan *least squares dummy variable* (LSDV). Persamaan FEM dalam bentuk linier sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \dots + \varepsilon_{it}$$

3.3.3 Random effect models

Metode estimasi yang menggunakan residual waktu dan individu yang saling berkaitan dan memiliki intersep berbeda pada setiap subjek. Persamaan REM dalam bentuk linier sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it}$$

Pemilihan model olah data:

Dengan 3 (tiga) jenis estimasi yang telah disebutkan diatas, untuk mengetahui model yang tepat untuk digunakan maka diperlukan uji pemilihan model dengan 2 pertimbangan yaitu :

3.3.4 Uji Chow (Uji F-statistik)

Uji Chow metode yang digunakan dalam pertimbangan pemilihan model antara *common effect models* atau *fixed effect models*. Dengan asumsi:

H₀ : Menggunakan *Common Effect Models*

H_a : Menggunakan *Fixed Effect Models*

Apabila hasil estimasi nilai *p-value* kurang dari 5% atau 10% maka menggunakan metode estimasi *fixed effect models*. Namun nilai *p-value* lebih dari 5% atau 10% maka tidak signifikan dan metode estimasi menggunakan *common effect models*.

3.3.5 Uji Hausman

Uji hausman metode dalam memilih antara model *fixed effect models* atau *random effect models*. Dengan asumsi :

H0 : Menggunakan *Fixed Effect Models*

Ha : Menggunakan *Random Effect Models*

Apabila hasil estimasi nilai *p-value* kurang dari 5% atau 10% maka menggunakan metode estimasi *fixed effect models*. Akan tetapi nilai *p-value* lebih dari 5% atau 10% maka metode estimasi mengaplikasikan *random effect models*.

3.3.6 Pengujian Hipotesis

3.3.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). terhadap variabel dependen yaitu Pengangguran maka mengaplikasikan analisis koefisien Determinasi(R^2).

Koefisien determinasi(R^2) merupakan analisis yang digunakan dalam mengetahui besar persentase jumlah variasi dalam variabel terikat pada model yang dijelaskan oleh variabel bebas. Besar nilai R^2 sejumlah antara $0 < R^2 < 1$. Maka semakin besar R^2 semakin layak kualitas model karena semakin jelas dapat menunjukkan Pengaruh variabel dependen dan independen. (Gujarati, 2012)

3.3.6.2 Uji Analisis F statistik

Uji analisis F statistik digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F diketahui dari nilai probabilitas. probabilitas $< 5\%$ maka menolak H_0 yang artinya berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan probabilitas $> 5\%$ maka menerima H_0 yang artinya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. .

3.3.6.3 Uji Analisis T Statistik

Uji analisis distribusi t statistik digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji t diketahui dari perbandingan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi. Apabila probabilitas $< 5\%$ maka menolak H_0 yang artinya berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan probabilitas $> 5\%$ maka menerima H_0 yang artinya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Variabel Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
 $H_0 : \beta_0 = 0$ Inflasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021
 $H_a : \beta_1 < 0$ Inflasi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021
2. Variabel Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
 $H_0 : \beta_0 = 0$ Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021
 $H_a : \beta_1 > 0$ Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia
3. Variabel PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
 $H_0 : \beta_0 = 0$ PDRB tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia
 $H_a : \beta_1 < 0$ PDRB berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia
4. Variabel IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
 $H_0 : \beta_0 = 0$ IPM tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia
 $H_a : \beta_1 < 0$ IPM berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

BAB IV

HASIL ANALISIS

4.1 Analisis Deskriptif Data

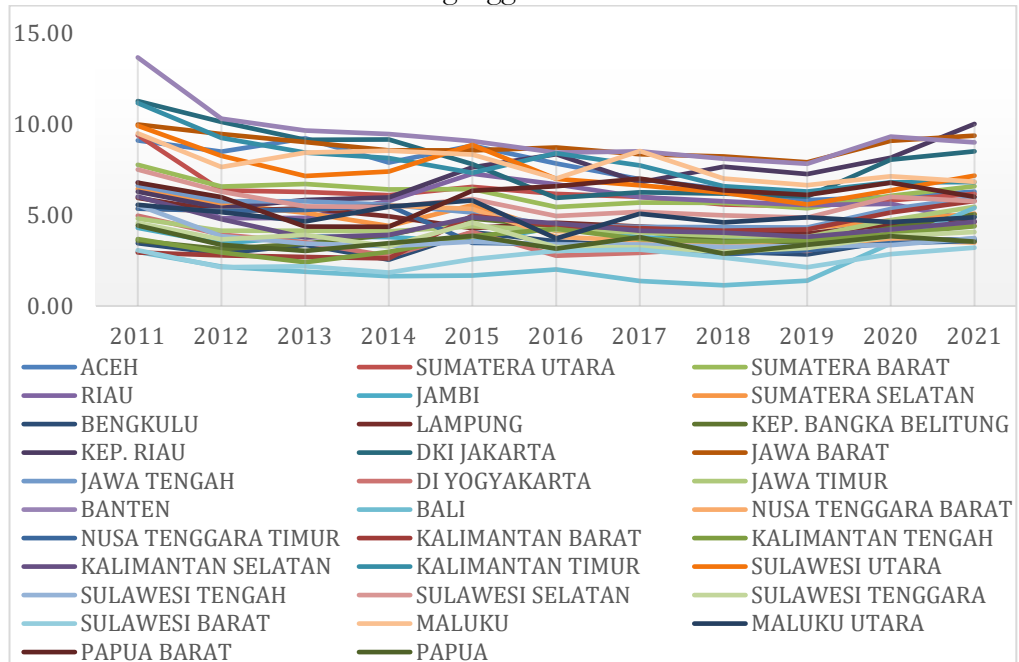
Berdasarkan data yang telah disajikan di atas menggunakan analisis data panel dengan mengkaji terkait pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia selama 10 tahun dengan periode waktu 2011 hingga 2021. Data menggunakan data *time series* dengan periode waktu 2011-2021 dan data (*cross-section*) yang mencakup 33 provinsi di Indonesia.

Variabel independen yang digunakan yaitu Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan untuk variabel dependen yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Pengolahan data menggunakan analisis data panel dengan alat pengolah data yang digunakan Eviews 9. Berikut merupakan deskriptif nilai statistik *mean* atau rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

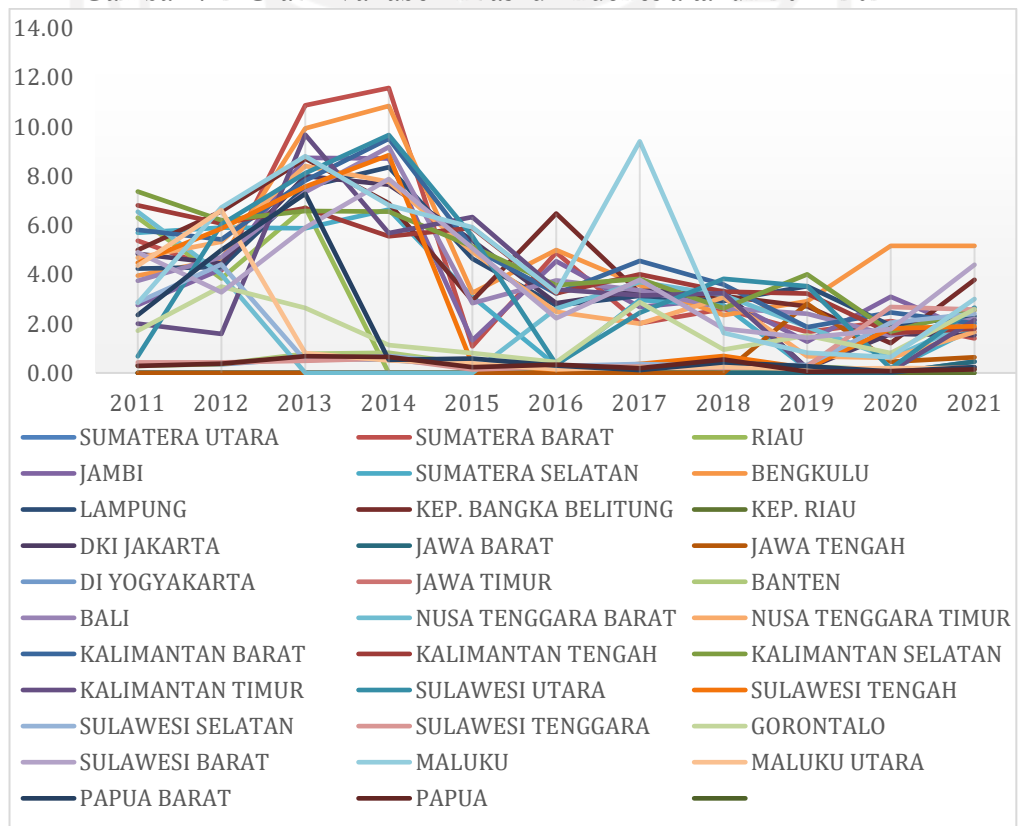
Tabel 4. 1 Deskriptif Data Penelitian

	TPT (%)	Inflasi (%)	Upah Minimum (Rupiah)	PDRB (Ribu Rupiah)	IPM (%)
Mean	5,252	3,062	1872224.129	37890.939	69,072
Maksimum	13,68	11,58	4.416.186	174.962.98	81,11
Minimum	1,14	0,05	675.000	9.675.89	55,01
Std.Deviasi	2,048	2,684	708405.0211	29760.947	4,455

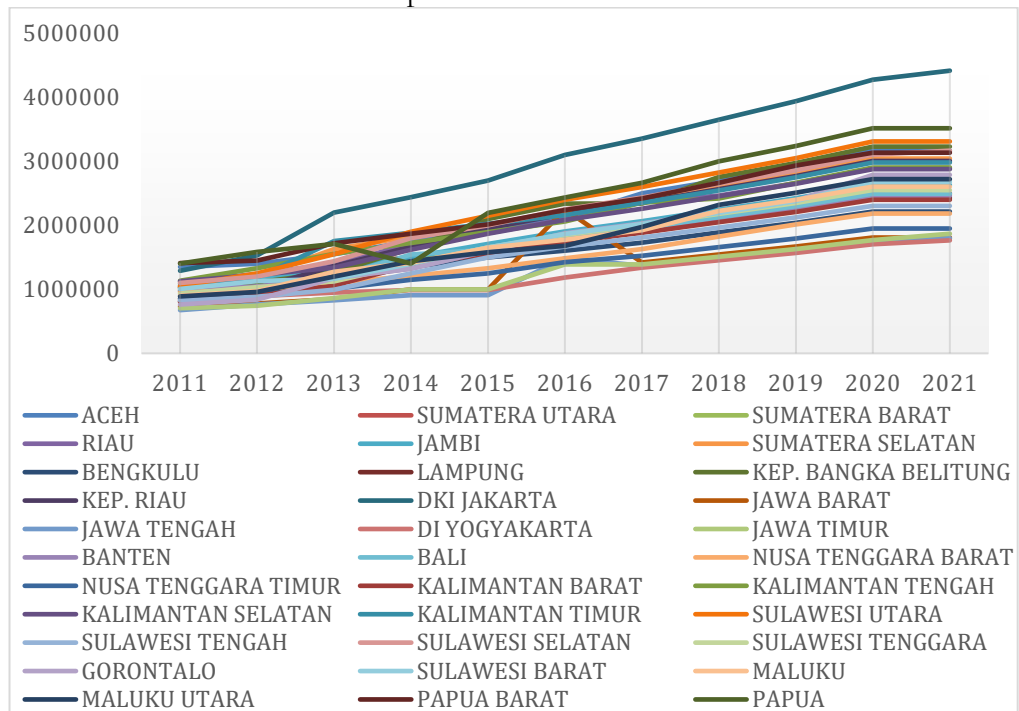
Gambar 4. 1 Grafik Variabel Pengangguran di Indonesia tahun 2011-2021



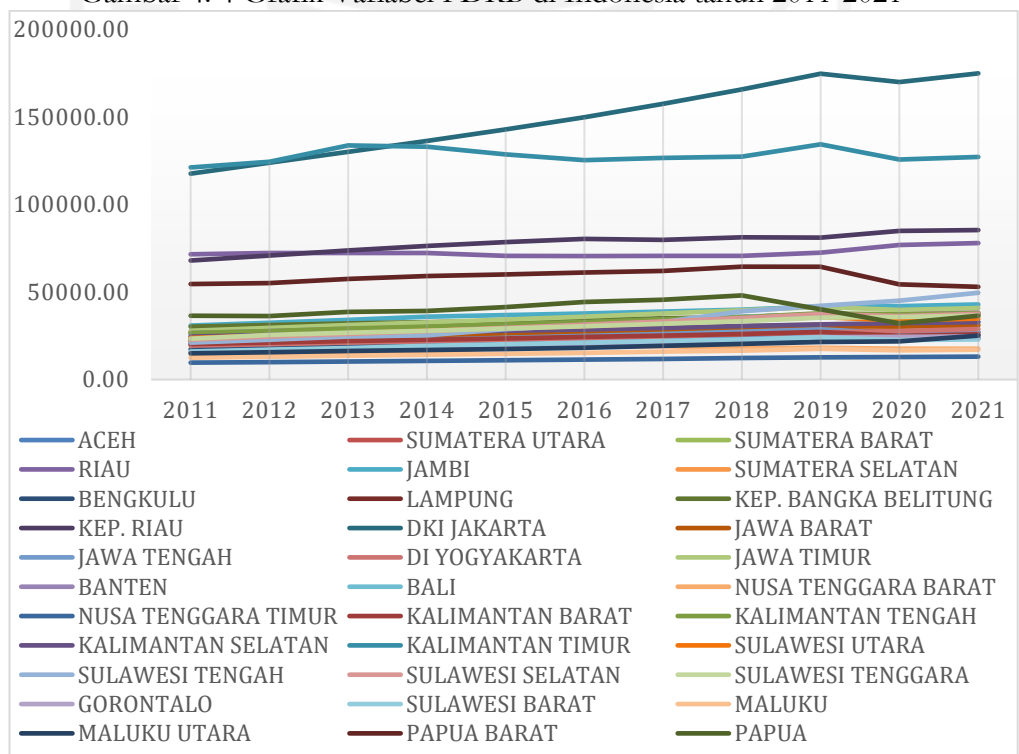
Gambar 4. 2 Grafik Variabel Inflasi di Indonesia tahun 2011-2021



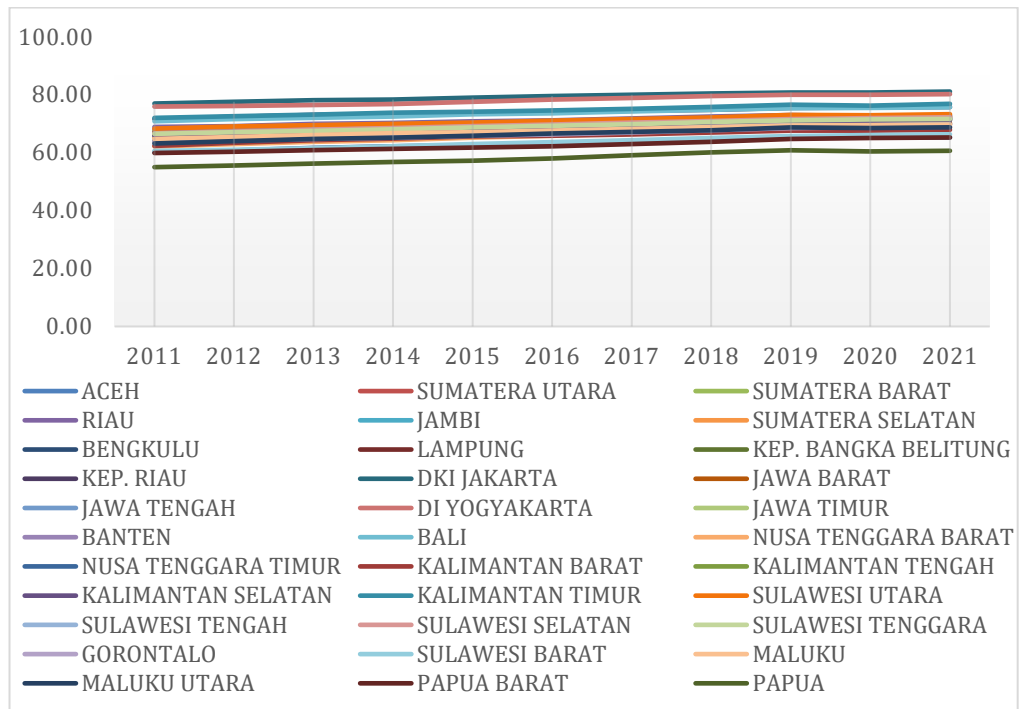
Gambar 4. 3 Grafik Variabel Upah Minimum di Indonesia tahun 2011-2021



Gambar 4. 4 Grafik Variabel PDRB di Indonesia tahun 2011-2021



Gambar 4. 5 Grafik Variabel IPM di Indonesia tahun 2011-2021



Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada variabel pengangguran di Indonesia tahun 2011-2021 tingkat pengangguran tertinggi berada di provinsi Banten tahun 2011 dengan nilai sebesar 13,68% dan Provinsi Bali tahun 2018 memiliki tingkat pengangguran terendah di Indonesia dengan nilai sebesar 1,14% yang terlihat pada grafik 4.1. Variabel inflasi di Indonesia tahun 2011-2021 nilai tertinggi di Sumatera Barat tahun 2014 sebesar 11,8% dan untuk nilai terendah berada di Papua tahun 2019 sebesar 0,05% ini terlihat pada grafik 4.2.

Provinsi dengan upah minimum tertinggi di Indonesia berada di DKI Jakarta pada tahun 2021 dengan nilai 4.416.186 rupiah, sedangkan provinsi dengan upah minimum terendah berada di Jawa Tengah pada tahun 2011 dengan nilai sebesar 675.000 rupiah ini terlihat pada grafik 4.3. Untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Indonesia ada di DKI Jakarta tahun 2021 sebesar 174.962.98 ribu rupiah, dan PDRB terendah di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011 sebesar 9675.89 ribu rupiah ini terlihat pada grafik 4.4. Dan yang terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai tertinggi di DKI Jakarta tahun 2021 sebesar 81,11%, sedangkan IPM terendah

berada di provinsi Papua tahun 2011 sebesar 55,01% ini terlihat pada grafik 4.5.

4.2 Regresi Data Panel

Metode regresi data panel terdiri dari 3 (tiga) model yaitu, *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Langkah yang diperlukan guna mengetahui hasil estimasi terbaik maka perlu dilakukan uji data panel dengan menggunakan uji *chow* dan uji *hausman*.

4.2.1 Pemilihan Model

Pemilihan model regresi dalam penelitian menggunakan regresi data panel. Regresi data panel memiliki tiga metode yang dapat digunakan yaitu : *Common Effect Models*, *Fixed Effect Models*, *Random effect models*. Pemilihan model yang sesuai dengan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Chow dan Uji Hausman

4.2.2 Uji Chow

Metode ini merupakan metode yang digunakan dalam pertimbangan pemilihan model antara *common effect* atau *fixed effect* berikut hasil uji chow

Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	43.820837	(32,326)	0.0000
Cross-section Chi square	605.475630	32	0.0000

Berdasarkan dari tabel dapat diketahui nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar $0.0000 < 0.05$ maka menolak H_0 yang berarti bahwa model yang tepat digunakan yaitu model *fixed effect models*.

4.2.3 Uji Hausman

Uji hausman merupakan metode yang dapat digunakan dalam memilih antara model *fixed effect* atau *random effect* berikut hasil uji hausmant.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausment

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	30.045094	4	0.0000

Berdasarkan dari tabel dapat diketahui nilai probabilitas Cross-section random sebesar $0.0000 < 0.05$ maka menerima H_0 yang berarti bahwa model yang tepat digunakan yaitu model *fixed effect models*.

4.3 Model Regresi Terbaik

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diatas maka dapat diketahui bahwa model terbaik yang dapat digunakan guna melakukan analisis yaitu model regresi *fixed effect model*

Tabel 4. 4 Hasil Pengujian *Fixed Effect Models*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.35061	5.239435	4.456704	0.0000
INFLASI	-0.036617	0.024448	-1.497720	0.1352
UPAH	4.457551366	2.58E-07	1.727770	0.0850
PDRB	-4.93597709894	1.34E-05	-3.683080	0.0003
IPM	-0.245398	0.080723	-3.039997	0.0026
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.839852	Mean dependent var		5.252534
Adjusted R-squared	0.822167	S.D. dependent var		2.048471
F-statistic	47.48931	Durbin-Watson stat		0.827669
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan tabel hasil oleh data di atas maka langkah selanjutnya yaitu evaluasi guna mengetahui terkait pengaruh antara variabel independen Inflasi, Upah Minimum, PDRB, IPM terhadap variabel dependen Pengangguran. Evaluasi tersebut terdiri dari koefisien determinasi, uji F-statistic, dan uji t statistic.

4.3.1 Koefisien Determinasi (R²)

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu menjelaskan perubahan atau variasi dari

variabel dependen Pengangguran maka digunakan analisis koefisien Determinasi(R^2).

Berdasarkan dari tabel dapat diketahui nilai *R-Square* sebesar 0.822167 yang berarti dalam penelitian ini variabel independen yaitu Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjelaskan variabel tingkat pengangguran sebesar 82.21% serta untuk 17.79% di jelaskan menggunakan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.3.2 Uji Analisis F statistik

Uji analisis F statistik untuk menguji apakah terdapat pengaruh simultan koefisien variabel regresi secara signifikan. Dapat diketahui dari tabel hasil regresi di atas bahwa nilai P-value sebesar $0.000000 < \alpha$ (5%) yang berarti signifikan menolak H_0 . maka dapat diartikan bahwa variabel independen Inflasi, Upah Minimum, Produk Regional Domestik Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Pengangguran.

4.3.3 Uji Analisis T statistik

Uji analisis distribusi t statistik digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berikut hasil uji t :

a. Variabel Inflasi terhadap Pengangguran

$H_0 : \beta_0 = 0$ Inflasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

$H_a : \beta_1 < 0$ Inflasi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021

Variabel inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar $0.1352 > \alpha$ (10%) maka gagal menolak H_0 sehingga variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021.

b. Variabel Upah Minimum terhadap Pengangguran sebesar

$H_0 : \beta_0 = 0$ Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021

$H_a : \beta_1 > 0$ Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021

Variabel Upah Minimum memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0850 < \alpha$ (10%) maka menolak H_0 sehingga variabel Upah Minimum berpengaruh dan berdasarkan nilai koefisien sebesar 4.457551366 Upah Minimum berpengaruh positif terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021.

c. Variabel Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)

$H_0 : \beta_0 = 0$ PDRB tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021

$H_a : \beta_1 < 0$ PDRB berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021

Variabel PDRB memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0003 < \alpha$ (1%) maka menolak H_0 sehingga variabel PDRB berpengaruh dan berdasarkan nilai koefisien sebesar -4.93597709894 PDRB berpengaruh negatif terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021

d. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

$H_0 : \beta_0 = 0$ IPM tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021

$H_a : \beta_1 < 0$ IPM berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021

Variabel IPM memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0026 < \alpha$ (1%) maka menolak H_0 sehingga variabel IPM berpengaruh dan berdasarkan nilai koefisien sebesar -0.245398 IPM berpengaruh negatif terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2011-2021

4.3.4 Analisis Ekonomi

4.3.4.1 Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada hasil penelitian di atas nilai probabilitas sebesar 0.1352 dan nilai koefisien -0.036617. Maka variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran. Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini

menjelaskan bahwa kondisi inflasi yang terjadi di Indonesia berbeda dengan teori kurva Phillips.

Pada kurva Phillips inflasi terjadi karena adanya kenaikan permintaan agregat, atau yang disebabkan oleh demand pull inflation. Hal ini berbeda dengan inflasi yang terjadi di Indonesia, Indonesia terjadi inflasi karena adanya kenaikan harga atau cost push inflation seperti, kenaikan harga BBM. Inflasi menyebabkan kegiatan produksi sangat tidak menguntungkan bagi para pemegang modal dikarenakan biaya modal semakin meningkat. Oleh karena itu pemilik modal lebih memilih untuk melakukan investasi yang tidak produktif. Hal ini menyebabkan peningkatan suku bunga yang menurunkan investasi produktif. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kesempatan kerja dan peningkatan pengangguran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saptenno & Maatoke, 2015) yang mengatakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran di Maluku dan (Kuntiarti, 2018) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2015.

4.3.4.2 Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada hasil penelitian di atas Variabel Upah minimum signifikan positif terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Diketahui nilai probabilitas sebesar 0.0850 dan nilai koefisien regresi sebesar 4.457551366 maka ketika Upah Minimum naik sebesar satu rupiah meningkatkan pengangguran sebesar 4.457551366%. Berdasarkan penjabaran tersebut hipotesis yang menyatakan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka terbukti.

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang menyatakan semakin tinggi upah yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada biaya produksi yang perlu dikeluarkan perusahaan yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut berpengaruh pada kebutuhan tenaga kerja yang akan diturunkan sehingga pengangguran meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prawira, 2018) yang mengatakan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran dan (Indra & Hadi, 2016) yang mengatakan bahwa upah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran. .

4.3.4.3 Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada hasil penelitian di atas PDRB berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Diketahui nilai probabilitas sebesar 0.0003 dan nilai koefisien regresi sebesar -4.93597709894. Ketika PDRB naik sebesar satu ribu rupiah maka menurunkan tingkat pengangguran sebesar 4.93597709894%. Berdasarkan penjabaran hipotesis yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) mempunyai pengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka terbukti.

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran. PDRB mencerminkan hasil output seperti pada hukum ohm menjelaskan output salah satu indikasi untuk melihat adanya kesempatan kerja. Kondisi peningkatan PDRB akan mendorong tersedia kesempatan kerja yang lebih banyak sehingga permintaan tenaga kerja meningkat maka pengangguran akan menurun. Hal tersebut menjelaskan peningkatan PDRB akan menurunkan pengangguran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Silaban et al., 2020) yang mengatakan bahwa Produk Domestik Riil Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran terbuka dan (Sembiring & Sasongko, 2019) PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2011-2017.

4.3.4.4 Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada hasil penelitian di atas IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Diketahui nilai probabilitas sebesar 0.0026 dan nilai koefisien regresi sebesar -0.245398. Dengan demikian apabila IPM naik sebesar satu persen maka menurunkan

tingkat pengangguran sebesar 0.245398%. Berdasarkan penjabaran tersebut hipotesis yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka terbukti.

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. IPM berfokus pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketika IPM mengalami peningkatan maka akan diikuti dengan peningkatan kemampuan dan pengetahuan. Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja karena dapat menghasilkan produksi lebih banyak. Ketika produktivitas tenaga kerja meningkat maka permintaan akan tenaga kerja juga akan meningkat sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saptenno & Maatoke, 2015) yang mengatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran dan (Mahroji & Nurkhasanah, 2019) yang mengatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Banten. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Socharjoto & Oktavia, 2021) IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2015-2018.

4.3.5 Analisis Intersep

Tabel 4. 5 Hasil *Intersep Cross section effect*

Provinsi	Effect	Coefisien
ACEH	1.570079	24.920689
SUMATERA UTARA	1.135058	24.485668
SUMATERA BARAT	0.930764	24.281374
RIAU	2.730364	26.080974
JAMBI	-1.173862	22.176748
SUMATERA SELATAN	-1.004097	22.346513
BENGKULU	-2.573198	20.777412
LAMPUNG	-1.435919	21.914691
KEP. BANGKA BELITUNG	-1.450810	21.8998
KEP. RIAU	5.111493	28.462103
DKI JAKARTA	10.351440	33.702050
JAWA BARAT	3.515991	26.866601
JAWA TENGAH	-0.199726	23.150884
DI YOGYAKARTA	0.066391	23.417001
JAWA TIMUR	-0.782097	22.568513
BANTEN	4.247770	27.598380
BALI	-2.083265	21.267345
NUSA TENGGARA BARAT	-2.557982	20.792628
NUSA TENGGARA TIMUR	-3.732312	19.618298
KALIMANTAN BARAT	-2.619722	20.730888
KALIMANTAN TENGAH	-1.988054	21.362556
KALIMANTAN SELATAN	-1.338026	22.012584
KALIMANTAN TIMUR	8.360012	31.710622
SULAWESI UTARA	2.019269	25.369879
SULAWESI TENGAH	-2.145954	21.204656
SULAWESI SELATAN	0.024252	23.374862
SULAWESI TENGGARA	-1.920909	21.429701
GORONTALO	-2.833857	20.516753
SULAWESI BARAT	-4.784833	18.565777
MALUKU	1.135953	24.486563
MALUKU UTARA	-1.934896	21.415714
PAPUA BARAT	0.013281	23.363891
PAPUA	-4.652599	18.698011

Intersep Cross section effect digunakan untuk mengetahui peringkat suatu daerah yang memiliki perbedaan tingkat pengangguran tertinggi dan terendah di Indonesia. Dari tabel diatas dapat diketahui Intersep Cross Section

Effect bahwa DKI Jakarta memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia sebesar 33.702050, hal ini disebabkan karena DKI Jakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah lapangan kerja yang rendah.

Sulawesi Barat memiliki tingkat pengangguran terendah di Indonesia dengan nilai sebesar 18.565777, Sulawesi Barat memiliki program Malaqbi yang berfokus pada upaya mengatasi kemiskinan melalui perbaikan infrastruktur. Terdapat program pendukung Marasa yang berfokus pada pemberdayaan yang mencakup pendidikan, kesehatan dan kemandirian daerah. Selain terdapat program diatas Sulawesi Barat juga memiliki persebaran tenaga kerja yang tinggi dan wilayah luas dengan penduduk yang sedikit.



BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh variabel independen Inflasi, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011 – 2021 dengan menggunakan metode analisis regresi data panel dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Inflasi tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011-2021.
2. Variabel Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011-2021.
3. Variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011-2021.
4. Variabel IPM berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011-2021.
5. *Intersep Cross section effect* tertinggi berada di DKI Jakarta dengan koefisien sebesar 33.702050 dan terendah di Sulawesi Barat 18.565777.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka implikasi yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aturan dalam penentuan peningkatan Upah Minimum Provinsi di Indonesia perlu disesuaikan dengan jumlah lahan pekerjaan yang tersedia agar penyerapan tenaga kerja dapat lebih maksimal dan mengurangi tingkat pengangguran.
2. Dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan sektor industri pengolahan terutama pada UKM yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar agar PDRB dapat terus meningkat.

3. Dalam upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dapat dilakukan dengan bantuan pemerintah dalam bentuk pemberian fasilitas publik yang lebih baik terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
4. Keterbatasan penelitian ini terletak pada model regresi yang menggunakan linier yang menjadikan terdapat bias pada satuan data. Hal tersebut apabila penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian dapat menggunakan regresi non linier.

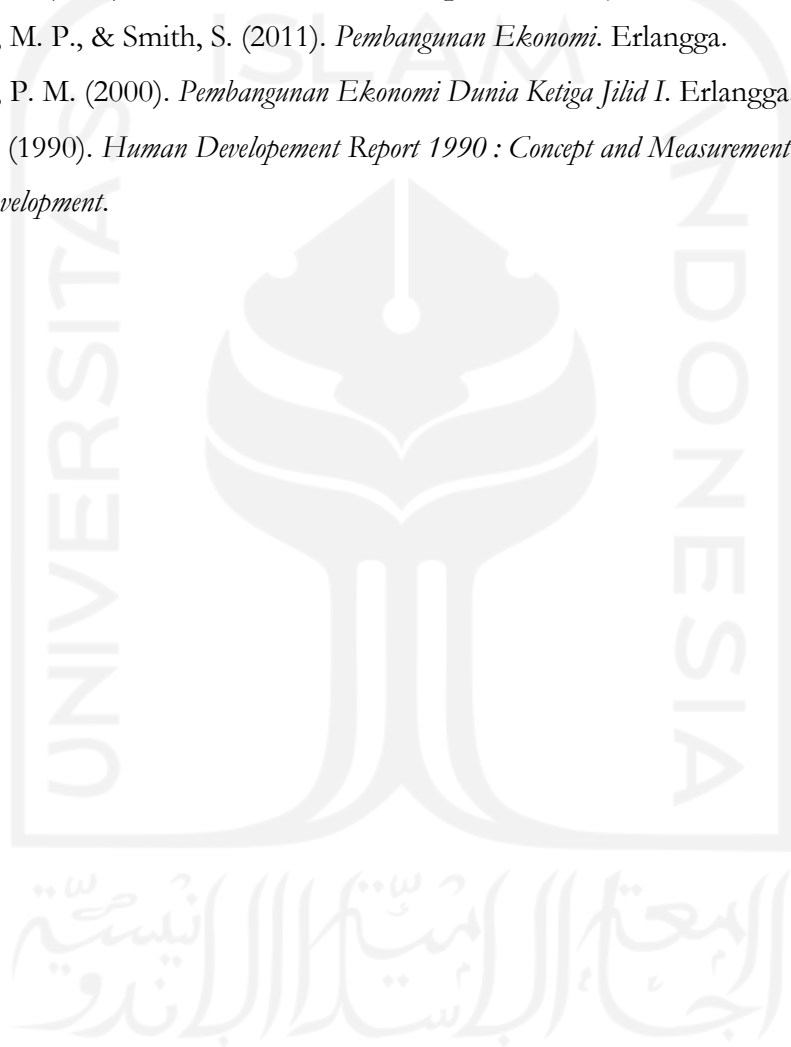


DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Inflasi*. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022a). *PDRB*. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022b). *Tingkat Pengangguran Terbuka*. Badan Pusat Statistik.
https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1177/sdgs_11/1
- Badan Pusat Statistik. (2022c). *Upah*. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/Istilah/index?Istilah%5Bberawalan%5D=U>
- Boediono. (1998). *Teori Pertumbuhan Ekonomi. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*.
- Faisal, M. (2021, May 3). *Angka Pengangguran Muda RI Tertinggi se-Asia Tenggara*. CNN.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210503170819-92-638002/angka-pengangguran-muda-ri-tertinggi-se-asia-tenggara>
- Hartarto, A. (2019, February 15). *Kemenperin: Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Terus Meningkat*. Kementerian Perindustrian.
<https://kemenperin.go.id/artikel/20288/Penyerapan-Tenaga-Kerja-Industri-Manufaktur-Terus-Meningkat>
- Indra, S., & Hadi, W. B. (2016, April 1). *Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi-Qu.
<https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4143>
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (1999). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989*.
- Kementerian Perindustrian. (2003). *UU No. 13 tahun 2003*.
- Kuntiarti, D. D. (2018). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2010-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(1), 1–9. <http://journal.student.uny.ac.id/>
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1).
<https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>

- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi* (6th ed.). Erlangga.
- Marliana, L. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 87–91.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.490>
- Menteri Ketenagakerjaan. (2021, February 17). *Atasi Pengangguran, Ini Upaya Menaker Memperluas Kesempatan Kerja*. Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2021/02/17/172541526/atasi-pengangguran-ini-upaya-menaker-memperluas-kesempatan-kerja>
- Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Rajagrafindo Persada.
- Okun, A. . (1962). *Potential GNP: Its Measurement and Significance*.
- Phillips, A. W. (1958). *The Relation Between Unemployment and The Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom*. *Economica*.
- Prawira, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(4), 162. <https://doi.org/10.24036/JMPE.V1I1.4735>
- Putri, R. F. (2015). Analisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap pengangguran terdidik. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 175–181.
- Rahmiati, D. P., & Panorama, M. (2020). *Pengaruh inflasi, produk domestik bruto (pdb) dan neraca perdagangan terhadap jumlah pengangguran di indonesia 1), 2)*. 30–36.
- Sadono, S. (2004). *Makroekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Saptenno, F., & Maatoke, C. K. (2015). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Maluku. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 41–49.
- Sembiring, V. B. P., & Sasongko, G. (2019). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto , Inflasi , Upah Minimum , dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011 – 2017*. 3(4), 430–443.
- Silaban, P. S. M. ., Sembiring, I. P. S. B., & Sitepu, V. A. B. (2020). *Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Periode 2003-2019*. 11(02), 127–132.

- Socharjoto, & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 94–102.
<https://doi.org/10.31294/eco.v5i2.10070>
- Sukirno, S. (2005). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Todaro, P. M. (2000). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I*. Erlangga.
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990 : Concept and Measurement of Human Development*.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Variabel Penelitian

Tahun	Provinsi	TPT (%)	Inflasi (%)	Upah Minimum (Rupiah)	PDRB (Ribu Rupiah)	IPM (%)
2011	ACEH	9.11	7.35	1350000	22704.80	67.45
2012	ACEH	8.50	0.22	1400000	23099.13	67.81
2013	ACEH	9.23	0.51	1550000	23228.59	68.30
2014	ACEH	7.89	0.66	1750000	23129.04	68.81
2015	ACEH	8.83	0.13	1900000	22524.31	69.45
2016	ACEH	7.85	0.33	2118500	22835.29	70.00
2017	ACEH	6.98	0.35	2500000	23362.90	70.60
2018	ACEH	6.44	0.15	2700000	24013.79	71.19
2019	ACEH	5.83	0.14	2916810	24842.30	71.90
2020	ACEH	6.00	0.30	3165031	25018.28	71.99
2021	ACEH	6.30	0.19	3165031	25357.40	72.18
2011	SUMATERA UTARA	9.40	3.67	1035500	26711.24	67.34
2012	SUMATERA UTARA	6.36	3.86	1200000	28036.88	67.74
2013	SUMATERA UTARA	6.27	10.18	1375000	29339.21	68.87
2014	SUMATERA UTARA	6.09	8.17	1505850	30477.07	69.51
2015	SUMATERA UTARA	6.55	3.24	1625000	31637.41	69.51
2016	SUMATERA UTARA	6.17	6.34	1811875	32885.09	70.00
2017	SUMATERA UTARA	6.01	3.20	1961354	34183.58	70.57
2018	SUMATERA UTARA	5.58	1.23	2132189	35570.50	71.18
2019	SUMATERA UTARA	5.48	2.33	2303403	36853.59	71.74
2020	SUMATERA UTARA	5.81	1.96	2499423	36175.16	71.77
2021	SUMATERA UTARA	6.17	0.46	2499423	36666.20	72.00
2011	SUMATERA BARAT	7.77	5.37	1055000	22638.75	67.81
2012	SUMATERA BARAT	6.57	4.16	1150000	23744.01	68.36
2013	SUMATERA BARAT	6.71	10.87	1350000	24857.64	68.91

2014	SUMATERA BARAT	6.41	11.58	1490000	25982.83	69.36
2015	SUMATERA BARAT	6.44	1.08	1615000	27080.76	69.98
2016	SUMATERA BARAT	5.45	4.89	1800725	28164.93	70.73
2017	SUMATERA BARAT	5.69	2.02	1949284	29312.17	71.24
2018	SUMATERA BARAT	5.67	2.60	2119067	30470.80	71.73
2019	SUMATERA BARAT	5.38	1.66	2289220	31427.29	72.39
2020	SUMATERA BARAT	6.07	2.11	2484041	30694.42	72.38
2021	SUMATERA BARAT	6.60	1.40	2484041	31360.00	72.65
2011	RIAU	6.80	6.31	1120000	71637.89	68.90
2012	RIAU	4.83	3.84	1238000	72396.34	69.15
2013	RIAU	4.84	6.73	1400000	72297.05	69.91
2014	RIAU	5.78	8.65	1700000	72390.88	70.33
2015	RIAU	7.28	2.65	1878000	70769.78	70.84
2016	RIAU	6.69	4.04	2095000	70569.36	71.20
2017	RIAU	5.99	4.2	2358454	70740.43	71.79
2018	RIAU	5.77	2.45	2464154	70736.77	72.44
2019	RIAU	5.56	2.36	2662026	72509.14	73.00
2020	RIAU	5.62	0.20	2888564	76882.94	72.71
2021	RIAU	4.69	0.17	2888564	77993.33	72.94
2011	JAMBI	4.31	2.76	1028000	30856.66	66.14
2012	JAMBI	3.45	4.22	1142500	32417.72	66.94
2013	JAMBI	3.83	8.74	1300000	34012.10	67.76
2014	JAMBI	3.79	8.72	1502300	35878.09	68.24
2015	JAMBI	3.54	1.32	1710000	36753.52	68.89
2016	JAMBI	4.33	4.54	1906650	37728.80	69.62
2017	JAMBI	3.77	2.68	2063000	38833.87	69.99
2018	JAMBI	3.65	3.02	2243719	40025.52	70.65
2019	JAMBI	3.79	1.27	2423889	41812.35	71.26
2020	JAMBI	4.70	3.09	2630162	41952.77	71.29
2021	JAMBI	4.93	1.67	2630162	42922.34	71.63
2011	SUMATERA SELATAN	6.45	5.70	1048440	27157.98	65.12
2012	SUMATERA SELATAN	5.63	5.90	1195220	28577.89	65.79
2013	SUMATERA SELATAN	5.13	5.88	1630000	29656.76	66.16

2014	SUMATERA SELATAN	4.40	6.64	1825000	30636.27	66.75
2015	SUMATERA SELATAN	5.55	3.10	1974346	31549.30	67.46
2016	SUMATERA SELATAN	4.13	0.29	2206000	32699.50	68.24
2017	SUMATERA SELATAN	4.10	2.96	2388000	34059.71	68.86
2018	SUMATERA SELATAN	4.18	2.74	2595995	35659.82	69.39
2019	SUMATERA SELATAN	4.28	0.17	2804453	37125.75	70.02
2020	SUMATERA SELATAN	4.71	0.13	3043111	37323.24	70.01
2021	SUMATERA SELATAN	5.08	1.82	3043111	38172.58	70.24
2011	BENGKULU	3.46	3.96	815000	17282.27	65.96
2012	BENGKULU	2.90	4.61	930000	18143.51	66.61
2013	BENGKULU	3.36	9.94	1200000	18919.30	67.50
2014	BENGKULU	2.55	10.85	1350000	19626.72	68.06
2015	BENGKULU	4.06	3.25	1500000	20302.48	68.59
2016	BENGKULU	3.57	5.00	1605000	21039.84	69.33
2017	BENGKULU	3.28	3.56	1731412	21751.64	69.95
2018	BENGKULU	2.99	2.35	1888741	22494.84	70.64
2019	BENGKULU	2.84	2.91	2040407	23504.53	71.21
2020	BENGKULU	3.58	4.05	2213604	23105.92	71.40
2021	BENGKULU	3.69	4.37	2215000	23532.24	71.64
2011	LAMPUNG	5.95	4.24	855000	20739.31	64.20
2012	LAMPUNG	5.21	4.30	975000	21794.83	64.87
2013	LAMPUNG	5.38	7.56	1150000	22770.68	65.73
2014	LAMPUNG	4.94	8.36	1399037	23647.27	66.42
2015	LAMPUNG	4.29	4.65	1581000	24581.78	66.95
2016	LAMPUNG	4.58	2.75	1763000	25568.57	67.65
2017	LAMPUNG	4.38	3.14	1908447	26614.88	68.25
2018	LAMPUNG	4.18	2.92	2074673	27736.26	69.02
2019	LAMPUNG	3.99	3.53	2241270	28894.50	69.57
2020	LAMPUNG	4.47	1.93	2432002	26743.75	69.69
2021	LAMPUNG	4.62	2.30	2432001	27197.46	69.90
2011	KEP. BANGKA BELITUNG	3.59	5.00	1024000	30212.18	66.59
2012	KEP. BANGKA BELITUNG	3.13	6.57	1110000	31172.42	67.21
2013	KEP. BANGKA BELITUNG	3.44	8.71	1265000	32081.30	67.92

2014	KEP. BANGKA BELITUNG	3.91	6.89	1640000	32859.64	68.27
2015	KEP. BANGKA BELITUNG	4.82	2.94	2100000	33480.38	69.05
2016	KEP. BANGKA BELITUNG	4.39	6.48	2341500	34132.87	69.55
2017	KEP. BANGKA BELITUNG	4.12	3.25	2341500	34933.52	69.99
2018	KEP. BANGKA BELITUNG	3.60	3.12	2755444	35762.04	70.67
2019	KEP. BANGKA BELITUNG	3.45	2.71	2976706	37173.14	71.30
2020	KEP. BANGKA BELITUNG	4.30	1.21	3230024	36302.97	71.47
2021	KEP. BANGKA BELITUNG	5.04	3.79	3230023	37579.45	71.69
2011	KEP. RIAU	6.29	3.68	975000	68024.21	71.61
2012	KEP. RIAU	5.40	2.38	1015000	70930.00	72.36
2013	KEP. RIAU	5.84	8.24	1365087	73743.33	73.02
2014	KEP. RIAU	5.98	7.59	1665000	76313.81	73.40
2015	KEP. RIAU	7.63	4.4	1954000	78625.43	73.75
2016	KEP. RIAU	8.36	3.53	2178710	80295.60	73.99
2017	KEP. RIAU	6.80	4.02	2358454	79743.68	74.45
2018	KEP. RIAU	7.67	3.47	2563875	81206.20	74.84
2019	KEP. RIAU	7.26	2.03	2769754	81138.52	75.48
2020	KEP. RIAU	8.16	1.18	3005460	85012.58	75.59
2021	KEP. RIAU	10.02	2.26	3005460	85425.89	75.79
2011	DKI JAKARTA	11.28	4.84	1290000	117672.9 2	76.98
2012	DKI JAKARTA	10.14	4.45	1529150	123962.3 8	77.53
2013	DKI JAKARTA	9.14	8.00	2200000	130060.3 1	78.08
2014	DKI JAKARTA	9.16	7.65	2441000	136312.3 4	78.39
2015	DKI JAKARTA	7.80	5.38	2700000	142913.6 0	78.99
2016	DKI JAKARTA	5.95	2.83	3100000	149831.9 0	79.60
2017	DKI JAKARTA	6.25	3.33	3355750	157636.6 0	80.06
2018	DKI JAKARTA	6.19	3.33	3648036	165769.0 0	80.47
2019	DKI JAKARTA	6.02	0.19	3940973	174812.5 1	80.76

2020	DKI JAKARTA	8.05	1.59	4276350	170099.6 8	80.77
2021	DKI JAKARTA	8.51	1.53	4416186	174962.9 8	81.11
2011	JAWA BARAT	9.99	3.1	732000	21976.53	66.67
2012	JAWA BARAT	9.46	3.86	780000	23036.00	67.32
2013	JAWA BARAT	9.02	9.15	850000	24118.31	68.25
2014	JAWA BARAT	8.56	7.6	1000000	24966.86	68.80
2015	JAWA BARAT	8.56	2.73	1000000	25845.50	69.50
2016	JAWA BARAT	8.73	2.75	2250000	26923.51	70.05
2017	JAWA BARAT	8.36	3.63	1420624	27970.92	70.69
2018	JAWA BARAT	8.23	3.54	1544361	29160.06	71.30
2019	JAWA BARAT	7.91	3.21	1668373	30413.37	72.03
2020	JAWA BARAT	9.09	2.18	1810351	30180.54	72.09
2021	JAWA BARAT	9.37	0.46	1810351	30907.59	72.45
2011	JAWA TENGAH	6.63	2.68	675000	20053.80	66.64
2012	JAWA TENGAH	5.76	4.24	765000	20950.62	67.21
2013	JAWA TENGAH	5.77	7.99	830000	21844.87	68.02
2014	JAWA TENGAH	5.57	8.22	910000	22819.16	68.78
2015	JAWA TENGAH	5.15	2.73	910000	23887.06	69.49
2016	JAWA TENGAH	4.42	2.36	1486065	24959.49	69.98
2017	JAWA TENGAH	4.36	3.71	1367000	26088.91	70.52
2018	JAWA TENGAH	4.33	2.82	1486065	27285.25	71.12
2019	JAWA TENGAH	4.32	2.81	1605396	28695.92	71.73
2020	JAWA TENGAH	5.34	0.46	1742015	26483.64	71.87
2021	JAWA TENGAH	5.96	0.64	1798979	27143.42	72.16
2011	DI YOGYAKARTA	4.97	0.32	808000	19387.45	75.93
2012	DI YOGYAKARTA	3.94	0.35	892660	20183.88	76.15
2013	DI YOGYAKARTA	3.50	0.59	947114	21037.70	76.44
2014	DI YOGYAKARTA	2.75	0.53	988500	21867.90	76.81
2015	DI YOGYAKARTA	4.07	0.26	988500	22688.36	77.59
2016	DI YOGYAKARTA	2.77	0.19	1182510	23565.68	78.38
2017	DI YOGYAKARTA	2.93	0.34	1337645	24533.80	78.89
2018	DI YOGYAKARTA	3.19	0.22	1454154	25776.31	79.53
2019	DI YOGYAKARTA	3.04	0.23	1570923	27008.68	79.99
2020	DI YOGYAKARTA	3.98	0.12	1704608	27750.38	79.97
2021	DI YOGYAKARTA	4.42	0.19	1765000	28901.58	80.22
2011	JAWA TIMUR	4.81	0.34	705000	27864.26	66.06
2012	JAWA TIMUR	4.14	0.37	745000	29508.40	66.74
2013	JAWA TIMUR	4.14	0.62	866250	31092.04	67.55
2014	JAWA TIMUR	4.11	0.63	1000000	32703.39	68.14
2015	JAWA TIMUR	4.39	0.26	1000000	34271.81	68.95
2016	JAWA TIMUR	4.18	0.23	1388000	35970.78	69.74

2017	JAWA TIMUR	4.05	0.33	1388000	37724.29	70.27
2018	JAWA TIMUR	3.84	0.24	1508895	39579.95	70.77
2019	JAWA TIMUR	3.80	0.18	1630059	41512.20	71.50
2020	JAWA TIMUR	4.72	0.12	1768777	39689.02	71.71
2021	JAWA TIMUR	5.46	0.23	1868777	40830.88	72.14
2011	BANTEN	13.68	0.28	1000000	26548.94	68.22
2012	BANTEN	10.31	0.36	1042000	27716.47	68.92
2013	BANTEN	9.66	0.78	1170000	28910.66	69.47
2014	BANTEN	9.47	0.82	1325000	29846.64	69.89
2015	BANTEN	9.07	0.35	1600000	30813.03	70.27
2016	BANTEN	8.44	0.24	1784000	31781.56	70.96
2017	BANTEN	8.52	0.33	1931180.0 0	32947.60	71.42
2018	BANTEN	8.10	0.28	2099385.0 0	34183.75	71.95
2019	BANTEN	7.83	0.27	2267990.0 0	35913.90	72.44
2020	BANTEN	9.32	0.12	2460997.0 0	37164.35	72.45
2021	BANTEN	9.00	0.16	2460996.0 0	38199.27	72.72
2011	BALI	2.98	3.75	890000.00	25265.96	70.87
2012	BALI	2.17	4.71	967500.00	26689.58	71.62
2013	BALI	1.88	7.35	1181000.0 0	28129.67	72.09
2014	BALI	1.64	9.18	1542600.0 0	29668.90	72.48
2015	BALI	1.68	2.84	1621172.0 0	31093.61	73.27
2016	BALI	2.01	3.76	1807600.0 0	32689.09	73.65
2017	BALI	1.38	3.35	1956727.0 0	34129.84	74.30
2018	BALI	1.14	2.64	2127157.0 0	35896.35	74.77
2019	BALI	1.40	2.40	2297969.0 0	37297.50	75.38
2020	BALI	3.44	1.52	2494000.0 0	34221.73	75.50
2021	BALI	5.40	2.20	2494000.0 0	32977.09	75.69
2011	NUSA TENGGARA BARAT	5.36	6.55	950000.00	14705.77	62.14
2012	NUSA TENGGARA BARAT	5.23	3.99	1000000.0 0	14276.69	62.98

2013	NUSA TENGGARA BARAT	5.29	9.51	1100000.0 0	14809.84	63.76
2014	NUSA TENGGARA BARAT	5.53	7.23	1210000.0 0	15369.94	64.31
2015	NUSA TENGGARA BARAT	5.34	3.41	1330000.0 0	18475.14	65.19
2016	NUSA TENGGARA BARAT	3.80	2.61	1482950.0 0	19305.79	65.81
2017	NUSA TENGGARA BARAT	3.59	3.70	1631245.0 0	19091.26	66.58
2018	NUSA TENGGARA BARAT	3.43	3.16	1825000.0 0	18020.50	67.30
2019	NUSA TENGGARA BARAT	3.22	1.87	2012610.0 0	18219.11	68.14
2020	NUSA TENGGARA BARAT	3.63	0.60	2183883.0 0	17583.11	68.25
2021	NUSA TENGGARA BARAT	3.49	2.12	2183883.0 0	17706.29	68.65
2011	NUSA TENGGARA TIMUR	5.36	4.68	850000.00	9675.89	60.24
2012	NUSA TENGGARA TIMUR	5.23	5.33	925000.00	10030.98	60.81
2013	NUSA TENGGARA TIMUR	5.29	8.41	1010000.0 0	10396.76	61.68
2014	NUSA TENGGARA TIMUR	5.53	7.76	1150000.0 0	10742.32	62.26
2015	NUSA TENGGARA TIMUR	3.48	4.92	1250000.0 0	11087.91	62.67
2016	NUSA TENGGARA TIMUR	3.42	2.48	1425000.0 0	11468.79	63.13
2017	NUSA TENGGARA TIMUR	3.24	2.00	1525000.0 0	11863.41	63.73
2018	NUSA TENGGARA TIMUR	2.84	3.07	1660000.0 0	12273.85	64.39
2019	NUSA TENGGARA TIMUR	3.06	0.67	1795000.0 0	12761.98	65.23
2020	NUSA TENGGARA TIMUR	3.46	0.61	1950000.0 0	12960.95	65.19
2021	NUSA TENGGARA TIMUR	3.58	1.67	1950000.0 0	13092.38	65.28
2011	KALIMANTAN BARAT	2.94	5.82	802500.00	20227.16	62.35
2012	KALIMANTAN BARAT	2.79	5.42	900000.00	21062.22	63.41
2013	KALIMANTAN BARAT	2.69	7.82	1060000.0 0	21971.93	64.30

2014	KALIMANTAN BARAT	2.62	9.52	1380000.0 0	22712.65	64.89
2015	KALIMANTAN BARAT	4.97	5.09	1560000.0 0	23456.52	65.59
2016	KALIMANTAN BARAT	4.41	3.23	1739400.0 0	24308.85	65.88
2017	KALIMANTAN BARAT	4.29	4.55	1882900.0 0	25198.01	66.26
2018	KALIMANTAN BARAT	4.14	3.59	2046900.0 0	26110.57	66.98
2019	KALIMANTAN BARAT	4.21	1.86	2211500.0 0	27199.78	67.65
2020	KALIMANTAN BARAT	5.14	2.46	2399699.0 0	24953.61	67.66
2021	KALIMANTAN BARAT	5.78	2.01	2399698.0 0	25807.40	67.90
2011	KALIMANTAN TENGAH	3.69	6.81	1134580.0 0	26588.90	66.38
2012	KALIMANTAN TENGAH	2.94	6.07	1327459.0 0	27749.01	66.66
2013	KALIMANTAN TENGAH	2.41	6.70	1553127.0 0	29106.40	67.41
2014	KALIMANTAN TENGAH	2.98	5.55	1723970.0 0	30216.73	67.77
2015	KALIMANTAN TENGAH	3.84	5.89	1896367.0 0	31619.18	68.53
2016	KALIMANTAN TENGAH	4.25	3.24	2057558.0 0	32899.58	69.13
2017	KALIMANTAN TENGAH	3.68	4.00	2354800.0 0	34370.63	69.79
2018	KALIMANTAN TENGAH	3.53	3.30	2421305.0 0	35548.43	70.42
2019	KALIMANTAN TENGAH	3.63	3.23	2663435.0 0	37870.47	70.91
2020	KALIMANTAN TENGAH	3.96	1.62	2903145.0 0	37148.73	71.05
2021	KALIMANTAN TENGAH	4.39	1.79	2903144.0 0	37856.42	71.25
2011	KALIMANTAN SELATAN	6.02	7.37	1126000.0 0	24567.52	65.89
2012	KALIMANTAN SELATAN	4.77	6.20	1225000.0 0	25547.77	66.68
2013	KALIMANTAN SELATAN	3.77	6.58	1337500.0 0	26423.90	67.17
2014	KALIMANTAN SELATAN	3.92	6.56	1620000.0 0	27220.27	67.63

2015	KALIMANTAN SELATAN	4.88	5.14	1870000.0 0	27786.68	68.38
2016	KALIMANTAN SELATAN	4.54	3.57	2085050.0 0	28540.05	69.05
2017	KALIMANTAN SELATAN	4.15	3.82	2258000.0 0	29578.79	69.65
2018	KALIMANTAN SELATAN	4.04	2.63	2454671.0 0	30614.85	70.17
2019	KALIMANTAN SELATAN	3.80	4.01	2651782.0 0	31611.46	70.72
2020	KALIMANTAN SELATAN	4.21	1.68	2877449.0 0	32210.58	70.91
2021	KALIMANTAN SELATAN	4.64	2.55	2877448.0 0	32846.66	71.28
2011	KALIMANTAN TIMUR	11.17	2.00	1084000.0 0	121196.2 3	72.02
2012	KALIMANTAN TIMUR	9.25	1.58	1177000.0 0	124501.8 8	72.62
2013	KALIMANTAN TIMUR	8.45	9.68	1752073.0 0	133868.6 8	73.21
2014	KALIMANTAN TIMUR	8.14	5.69	1886315.0 0	133086.1 1	73.82
2015	KALIMANTAN TIMUR	7.34	6.33	2026126.0 0	128603.1 3	74.17
2016	KALIMANTAN TIMUR	8.41	3.39	2161253.0 0	125385.5 0	74.59
2017	KALIMANTAN TIMUR	7.73	3.15	2354800.0 0	126625.1 9	75.12
2018	KALIMANTAN TIMUR	6.60	3.24	2543332.0 0	127354.1 9	75.83
2019	KALIMANTAN TIMUR	6.30	0.17	2747561.0 0	134410.5 5	76.61
2020	KALIMANTAN TIMUR	6.80	0.07	2981379.0 0	125807.5 2	76.24
2021	KALIMANTAN TIMUR	6.82	2.15	2981378.0 0	127171.0 8	76.88
2011	SULAWESI UTARA	9.92	0.67	1050000.0 0	23812.97	68.31
2012	SULAWESI UTARA	8.27	6.04	1250000.0 0	25145.96	69.04
2013	SULAWESI UTARA	7.15	8.12	1550000.0 0	26445.86	69.49
2014	SULAWESI UTARA	7.41	9.67	1900000.0 0	27805.52	69.96
2015	SULAWESI UTARA	8.86	5.56	2150000.0 0	29196.47	70.39

2016	SULAWESI UTARA	7.00	0.35	2400000.0 0	30679.97	71.05
2017	SULAWESI UTARA	6.65	2.44	2598000.0 0	32297.08	71.66
2018	SULAWESI UTARA	6.24	3.83	2824286.0 0	33911.61	72.20
2019	SULAWESI UTARA	5.59	3.52	3051076.0 0	35687.44	72.99
2020	SULAWESI UTARA	6.36	0.18	3310723.0 0	33670.44	72.93
2021	SULAWESI UTARA	7.17	2.65	3310723.0 0	34787.33	73.30
2011	SULAWESI TENGAH	5.55	4.47	827500.00	21105.70	64.27
2012	SULAWESI TENGAH	3.85	5.87	885000.00	22724.47	65.00
2013	SULAWESI TENGAH	3.43	7.57	995000.00	24490.98	65.79
2014	SULAWESI TENGAH	3.30	8.85	1250000.0 0	25316.27	66.43
2015	SULAWESI TENGAH	3.55	0.35	1500000.0 0	28778.64	66.76
2016	SULAWESI TENGAH	3.38	0.13	1670000.0 0	31151.08	67.47
2017	SULAWESI TENGAH	3.39	0.36	1807775.0 0	32860.48	68.11
2018	SULAWESI TENGAH	3.25	0.69	1965232.0 0	39049.35	68.88
2019	SULAWESI TENGAH	3.29	0.19	2123040.0 0	42054.50	69.50
2020	SULAWESI TENGAH	3.35	1.81	2303711.0 0	45052.32	69.55
2021	SULAWESI TENGAH	3.74	1.90	2303711.0 0	49588.29	69.79
2011	SULAWESI SELATAN	7.51	2.87	1100000.0 0	22769.19	66.65
2012	SULAWESI SELATAN	6.29	4.41	1200000.0 0	24507.17	67.26
2013	SULAWESI SELATAN	5.49	0.51	1440000.0 0	26083.42	67.92
2014	SULAWESI SELATAN	5.44	0.69	1800000.0 0	27749.47	68.49
2015	SULAWESI SELATAN	5.88	0.37	2000000.0 0	29435.92	69.15
2016	SULAWESI SELATAN	4.96	0.28	2250000.0 0	31302.53	69.76

2017	SULAWESI SELATAN	5.19	0.36	2435625.0 0	33234.11	70.34
2018	SULAWESI SELATAN	4.99	0.29	2647767.0 0	35243.64	70.90
2019	SULAWESI SELATAN	4.86	0.32	2860382.0 0	37474.29	71.66
2020	SULAWESI SELATAN	6.01	2.04	3103800.0 0	36246.26	71.93
2021	SULAWESI SELATAN	5.76	2.40	3165876.0 0	37573.32	72.24
2011	SULAWESI TENGGARA	4.57	0.43	930000.00	23338.07	66.52
2012	SULAWESI TENGGARA	3.67	0.43	1032300.0 0	25489.79	67.07
2013	SULAWESI TENGGARA	3.91	0.49	1125207.0 0	26815.36	67.55
2014	SULAWESI TENGGARA	3.28	0.58	1400000.0 0	27896.05	68.07
2015	SULAWESI TENGGARA	4.59	0.14	1652000.0 0	29202.70	68.75
2016	SULAWESI TENGGARA	3.25	0.25	1850000.0 0	30476.39	69.31
2017	SULAWESI TENGGARA	3.22	0.26	2002625.0 0	31894.42	69.86
2018	SULAWESI TENGGARA	2.98	0.21	2177052.0 0	33278.66	70.61
2019	SULAWESI TENGGARA	3.20	0.27	2351870.0 0	35309.90	71.20
2020	SULAWESI TENGGARA	3.84	2.68	2552015.0 0	35709.02	71.45
2021	SULAWESI TENGGARA	4.07	2.58	2552014.0 0	36581.89	71.66
2011	GORONTALO	5.85	1.71	762500.00	15687.65	63.48
2012	GORONTALO	4.70	3.51	837500.00	16650.27	64.16
2013	GORONTALO	4.33	2.64	1175000.0 0	17639.12	64.70
2014	GORONTALO	3.31	1.13	1325000.0 0	18622.44	65.17
2015	GORONTALO	3.86	0.80	1600000.0 0	19474.13	65.86
2016	GORONTALO	3.32	0.44	1875000.0 0	20427.46	66.29
2017	GORONTALO	3.97	2.88	2030000.0 0	21477.78	67.01
2018	GORONTALO	3.54	0.95	2206813.0 0	22538.55	67.71

2019	GORONTALO	3.51	1.52	2384020.0 0	24167.56	68.49
2020	GORONTALO	3.79	0.81	2788826.0 0	24313.24	68.68
2021	GORONTALO	3.21	2.59	2788826.0 0	24649.65	69.00
2011	SULAWESI BARAT	3.06	4.91	1006000.0 0	16023.45	60.63
2012	SULAWESI BARAT	2.13	3.28	1127000.0 0	17169.06	61.01
2013	SULAWESI BARAT	2.19	5.91	1165000.0 0	18008.81	61.53
2014	SULAWESI BARAT	1.84	7.88	1400000.0 0	19232.05	62.24
2015	SULAWESI BARAT	2.58	5.07	1655500.0 0	20250.51	62.96
2016	SULAWESI BARAT	3.03	2.23	1864000.0 0	21067.91	63.60
2017	SULAWESI BARAT	3.10	3.79	2017780.0 0	22001.01	64.30
2018	SULAWESI BARAT	2.67	1.80	2193530.0 0	22953.08	65.10
2019	SULAWESI BARAT	2.14	1.43	2381000.0 0	24163.56	65.73
2020	SULAWESI BARAT	2.86	1.78	2678863.0 0	22652.43	66.11
2021	SULAWESI BARAT	3.21	4.39	2678863.0 0	22879.78	66.36
2011	MALUKU	9.50	2.85	900000.00	12477.19	64.75
2012	MALUKU	7.65	6.73	975000.00	13129.11	65.43
2013	MALUKU	8.44	8.81	1275000.0 0	13572.07	66.09
2014	MALUKU	8.55	6.81	1415000.0 0	14219.62	66.74
2015	MALUKU	8.33	5.92	1650000.0 0	14740.38	67.05
2016	MALUKU	7.02	3.28	1775000.0 0	15321.18	67.60
2017	MALUKU	8.53	9.41	1925000.0 0	15942.45	68.19
2018	MALUKU	7.01	1.62	2222220.0 0	16607.02	68.87
2019	MALUKU	6.65	0.82	2400664.0 0	17556.86	69.45
2020	MALUKU	7.14	0.64	2604961.0 0	16687.79	69.49

2021	MALUKU	6.83	3.00	2604961.0 0	17019.39	69.71
2011	MALUKU UTARA	5.57	4.36	889350.00	14994.63	63.19
2012	MALUKU UTARA	5.16	6.61	960498.00	15691.01	63.93
2013	MALUKU UTARA	4.65	0.80	1200622.0 0	16332.22	64.78
2014	MALUKU UTARA	5.47	0.51	1440746.0 0	16869.52	65.18
2015	MALUKU UTARA	5.81	0.39	1577617.0 0	17533.78	65.91
2016	MALUKU UTARA	3.72	0.15	1681266.0 0	18177.30	66.63
2017	MALUKU UTARA	5.08	0.22	1975000.0 0	19192.97	67.20
2018	MALUKU UTARA	4.60	0.25	2320803.0 0	20309.45	67.76
2019	MALUKU UTARA	4.89	0.17	2508091.0 0	21524.99	68.70
2020	MALUKU UTARA	4.62	0.19	2721530.0 0	21906.60	68.49
2021	MALUKU UTARA	4.89	0.20	2721530.0 0	25104.43	68.76
2011	PAPUA BARAT	6.78	2.36	1410000.0 0	54539.86	59.90
2012	PAPUA BARAT	6.00	4.99	1450000.0 0	55047.84	60.30
2013	PAPUA BARAT	4.38	7.28	1720000.0 0	57581.36	60.91
2014	PAPUA BARAT	4.36	0.53	1870000.0 0	59142.59	61.28
2015	PAPUA BARAT	6.35	0.59	2015000.0 0	60064.13	61.73
2016	PAPUA BARAT	6.60	0.30	2237000.0 0	61242.01	62.21
2017	PAPUA BARAT	7.01	0.12	2421500.0 0	62169.96	62.99
2018	PAPUA BARAT	6.36	0.43	2667000.0 0	64499.45	63.74
2019	PAPUA BARAT	6.12	0.27	2934500.0 0	64418.52	64.70
2020	PAPUA BARAT	6.79	0.06	3134600.0 0	54487.70	65.09
2021	PAPUA BARAT	6.01	0.23	3134600.0 0	52979.33	65.26
2011	PAPUA	4.43	0.28	1403000.0 0	36383.24	55.01

2012	PAPUA	3.37	0.37	1585000.0 0	36280.03	55.55
2013	PAPUA	3.03	0.68	1710000.0 0	38621.36	56.25
2014	PAPUA	3.46	0.65	1403000.0 0	39271.88	56.75
2015	PAPUA	3.86	0.23	2193000.0 0	41376.97	57.25
2016	PAPUA	3.16	0.34	2435000.0 0	44342.14	58.05
2017	PAPUA	3.79	0.20	2663646.0 0	45577.05	59.09
2018	PAPUA	2.88	0.55	3000000.0 0	48069.41	60.06
2019	PAPUA	3.37	0.05	3240900.0 0	40203.42	60.84
2020	PAPUA	3.85	0.08	3516700.0 0	32108.51	60.44
2021	PAPUA	3.55	0.14	3516700.0 0	36416.72	60.62

Lampiran 2 : Pemilihan Model Terbaik

-Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	43.820837	(32,326)	0.0000
Cross-section Chi-square	605.475630	32	0.0000

- Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	30.045094	4	0.0000

- Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1047.435 (0.0000)	5.914771 (0.0150)	1053.350 (0.0000)
Honda	32.36410 (0.0000)	2.432030 (0.0075)	24.60458 (0.0000)
King-Wu	32.36410 (0.0000)	2.432030 (0.0075)	17.91491 (0.0000)
Standardized Honda	34.40118 (0.0000)	3.133674 (0.0009)	22.47413 (0.0000)
Standardized King-Wu	34.40118 (0.0000)	3.133674 (0.0009)	15.88334 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	1053.350 (0.0000)

Lampiran 3 : Uji Fixed Effect Models

Dependent Variable: PENGANGGURAN

Method: Panel Least Squares

Date: 08/10/22 Time: 12:25

Sample: 2011 2021

Periods included: 11

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 363

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.35061	5.239435	4.456704	0.0000
INFLASI	-0.036617	0.024448	-1.497720	0.1352
UPAH	4.46E-07	2.58E-07	1.727770	0.0850
PDRB	-4.94E-05	1.34E-05	-3.683080	0.0003
IPM	-0.245398	0.080723	-3.039997	0.0026

Effects Specification

Cross-section fixed (dummyvariables)

R-squared	0.839852	Mean dependent var	5.252534
Adjusted R-squared	0.822167	S.D. dependent var	2.048471
S.E. of regression	0.863846	Akaike info criterion	2.641506
Sum squared resid	243.2709	Schwarz criterion	3.038457
Log likelihood	-442.4334	Hannan-Quinn criter.	2.799292
F-statistic	47.48931	Durbin-Watson stat	0.827669
Prob(F-statistic)	0.000000		

